

## PENDUDUK DI PEDESAAN KEDU PADA ABAD XIX - AWAL ABAD XX: TINJAUAN SOSIAL-EKONOMI

Nur Aini Setiawati\*

### Pendahuluan

Kekurangmakmuran penduduk pribumi di pedesaan merupakan suatu gejala yang telah lama menghinggapinya masyarakat Jawa sejak tahun 1830-an. Gejala ini di sebabkan karena populasi yang besar,<sup>1</sup> penerapan Sistem Tanam Paksa, Politik Liberal, dan masuknya barang-barang industri yang murah ke daerah pedesaan.<sup>2</sup>

Kekurangmakmuran (*mindere welvaart*) di kalangan penduduk pedesaan Indonesia menjadi isu yang serius sejak zaman kolonial. Pada awal abad ke-20 pemerintah kolonial, berusaha untuk menyelidiki hal tersebut dengan melakukan suatu penelitian yang dikenal dengan *Midere welvaart onderzoek op Java*. Penelitian ini mulai di laksanakan pada tahun 1904.

Berkaitan dengan persoalan keterbelakangan ekonomi masyarakat pedesaan Jawa, Geertz mengatakan bahwa hal itu merupakan konsekuensi dari involusi usaha tani.<sup>3</sup> Adapun Boeke dengan konsep "ekonomi dualistis"-nya beranggapan bahwa sejak masuknya penjajahan yang membawa ide dualisme kapitalistis ke dalam masyarakat Timur umumnya, rumah tangga desa semakin miskin karena dihisap tanpa ada perubahan sifatnya.<sup>4</sup> Pendapat Boeke ini ditanggapi oleh Geertz dengan mengatakan bahwa gejala itu hanya berlaku bagi lapisan masyarakat yang memiliki posisi paling lemah dalam tawar-menawar, dalam hal; penyakapan, tingkat upah, ikatan hutang, ijon, kerja, dan lain-lain. Kesimpulan Geertz dan Boeke itu pada prinsipnya sama, yakni bahwa di bawah sistim kolonial masyarakat pedesaan Indonesia itu umumnya kurang makmur. Kelemahan argumen itu adalah bahwa keduanya tidak memperhatikan faktor lain penyebab kekurangmakmuran itu seperti; kebijaksanaan elit lokal, sistem penguasaan faktor produksi, kondisi sosial, orientasi nilai budaya, dan lain-lain.

---

\* Penulis adalah staf pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM

<sup>1</sup> D.H. Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid I (Jakarta: Pradnjaparamita, 1962), hlm. 93

<sup>2</sup> Soedjatmoko, "Dimensi-dimensi Struktural Kemiskinan" dalam Alfian (eds), *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai* (Jakarta: YIIS, 1980), hlm. 46-48.

<sup>3</sup> Clifford Geertz, *Agrucultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. (Berkeley: University of California Press (1963), hlm. 80.

<sup>4</sup> J.H. Boeke dan D.H. Burger, *Ekonomi Dualistis: Dialog antara Boeke dan Burger* (Jakarta: Bhratara, 1973), hlm. 93-94.

Di daerah Kedu penyelenggaraan sistem Tanam Paksa berkaitan dengan budidaya tanaman ekspor yang memerlukan lahan yang luas. Oleh karena itu, permintaan sewa tanah semakin tinggi, khususnya setelah dikeluarkannya, *Clearing Rent Ordinanced*. Pembukaan daerah Kedu menjadi politik ekonomi pemerintah kolonial yang berusaha untuk membudidayakan tanaman ekspor guna kepentingan ekonomi Belanda. Dengan dikeluarkannya *Rent Ordinanced* yang mengatur sewa menyewa tanah penduduk itu maka permintaan sewa tanah baik oleh pihak swasta Barat maupun pemerintah kolonial meningkat pesat.<sup>5</sup> Peraturan baru itu memaksa petani pemilik tanah untuk menyewakan tanahnya kepada pihak perkebunan, melalui aparat pemerintah desa. Tidak jarang mereka kehilangan hak atas tanahnya yang menjadi sumber pendapatan.<sup>6</sup>

Masuknya ekonomi uang memiliki konsekuensi tersendiri bagi perekonomian desa. Penghasilan yang minim menyebabkan kaum tani tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa umumnya para petani hidup dalam kondisi yang kurang makmur.

Tulisan ini akan mencoba untuk mengupas batas-batas pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan ekonomi petani di pedesaan Kedu selama periode abad XIX hingga awal abad XX. Indikator yang digunakan untuk, mengukur batas-batas itu adalah ukuran pendapatan dasar (*basic need income*) sebagaimana parameter yang dirumuskan oleh BPS. Kekurangmakmuran dalam kajian ini diartikan sebagai pendapatan yang kurang (*insufficiency of income*). Parameter ini juga dipakai oleh Broshooft. Menurut Brofshoof, pendapatan f 60/th bagi kehidupan petani hanya sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, dengan kata lain mereka berada di bawah garis subsistensi. Mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan, ongkos garap sawah, perbaikan rumah, pakaian, pembelian alat kerja, selamatan, membayar pajak dan keperluan lainnya.<sup>7</sup>

### Beberapa Hipotesis Penyebab Keterbelakangan Ekonomi Petani di Kedu

Pembukaan kebun-kebun kopi dan pembuatan jalan jalan baru memberatkan rakyat Kedu karena memakan banyak waktu dan tenaga rakyat. Menjelang pecahnya Perang Diponegoro, rakyat di distrik Lempuyang dan Jetis melaksanakan protes kepada kontrolir akibat beratnya beban kerja wajib dan

<sup>5</sup> Furnivall, *Netherlands India a Study of Plural Economy* (Amsterdam: B.M. Israel B.V., 1976), hlm. 201-201.

<sup>6</sup> J.H. Boeke, *op cit.*, hlm. 61.

<sup>7</sup> Djoko Suryo, "Masalah sekitar Kemiskinan di Pedesaan Masa Pemerintah Kolonial" (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, 1984), hlm. 8

pajak.<sup>8</sup> Kondisi yang memberatkan rakyat itu semakin diperburuk dengan adanya peristiwa meletusnya gunung Merapi pada tahun 1822 yang mengakibatkan menurunnya harga padi karena gagal panen.<sup>9</sup> Demikian pula, tingginya pajak yang diwajibkan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat Kedu semakin menekan kehidupan rakyat. Tertekannya kondisi rakyat semakin memuncak dengan adanya peranan Cina sebagai *pachter* bandar, yaitu pemeras uang rakyat di pasar-pasar dan pintu gerbang cukai. Mereka juga berprofesi sebagai tengkulak tembakau yang memberi hutang dan sering menyita hasil panen rakyat sebagai jaminan hutang.<sup>10</sup>

Kesulitan para petani yang harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang didibebankan oleh pemerintah kolonial melalui kaum pemuka pribumi, kurang tersedianya dana untuk keperluan perdagangan, menurunnya jumlah penerimaan pajak, tipisnya persediaan padi untuk keperluan sendiri semakin mempersulit ekonomi petani.<sup>11</sup> Tanaman komersial yang menggantikan tanaman tradisional yang menguras tenaga dan lahan petani serta tuntutan kepada petani untuk membayar pajak tanah dan kerja wajib menyebabkan kondisi kehidupan petani semakin merosot. Kekurangmakmuran yang melanda masyarakat Kedu dapat menimbulkan terjadinya protes petani, terutama apabila di daerah itu terdapat elite desa atau pemimpin agama yang radikal. Protes petani dilakukan sebagai respon langsung terhadap penetrasi kapitalisme Barat beserta implikasi ekonomisnya yang tidak diinginkan. Keadaan seperti itu menjadi alasan penting bagi para elite desa dan para pemimpin agama untuk menggerakkan rakyat.<sup>12</sup>

Munculnya kebijakan baru, yaitu berupa UU Agraria 1870, membuka kesempatan kerja baru bagi penduduk Kedu. Akan tetapi, sifat eksploitasi penduduk di pedesaan karena usaha perkebunan rakyat terdesak oleh munculnya perusahaan perkebunan pemerintah dan swasta. Dengan demikian, perluasan perusahaan perkebunan menempatkan penduduk pedesaan pada posisi yang sangat tergantung karena hasilnya tidak dapat sepenuhnya dinikmati penduduk pedesaan.

Tulisan ini akan memusatkan perhatian pada penyebab kekurangan makmuran penduduk desa Kedu selama abad XIX- awal abad XX. Diharapkan

<sup>8</sup> Djulianti Suroyo, "Kerja Wajib Sebagai Eksploitasi Kolonial Perkembangan di Karesidenan Kedu 1800-1890". Disertasi. (Yogyakarta: UGM, 1989), hlm. 135.

<sup>9</sup> Statistiek 1822, Kedu 7, ANRI.

<sup>10</sup> Djulianti Suroyo, *loc. cit.*

<sup>11</sup> R.E. Elson, "Kemiskinan dan kemakmuran Kaum Petani pada Masa Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa" dalam Anne Booth (eds.), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 43.

<sup>12</sup> Sartono Kartodirdjo, *Protest Movement in Rural Java* (Singapore: Oxford UP, 1973) hlm. 5-8.

tulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dari suatu proses sejarah yang panjang.

Beberapa pertanyaan pokok yang diajukan dalam penelitian itu adalah: 1. Seberapa besar tingkat populasi penduduk dan sejauh mana mereka dapat memenuhi kebutuhan tanah dan pangan sebagai kebutuhan dasar. 2. Bagaimana implikasi kebijakan pemerintah kolonial khususnya dalam ekspansi lahan perkebunan bagi penduduk. 3. Sejauh mana pemerintah kolonial memiliki perhatian terhadap usaha memecahkan masalah kekurangan makmuran penduduk pribumi di Kedu sehubungan dengan penerapan Politik Ethis.<sup>13</sup>

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu maka perlu diteliti proses perkembangan sumber daya manusia dan alam, struktur politik pemerintah, dan struktur ekonomi masyarakat Kedu sejak dijalkannya sistem Tanam Paksa hingga masa pemerintahan Hindia Belanda pada awal abad XX.

### Profil wilayah

Karesidenan Kedu secara geografis terletak di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan satu-satunya keresidenan di Jawa tanpa batas laut. Di sebelah selatan daerah ini terdiri atas dataran tinggi berlereng dan hampir semuanya dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Titik terendah dari dataran ini dijumpai di selatan Desa Bligo dekat perbatasan Jogjakarta setinggi 150 meter. Di lereng Selatan deretan pegunungan Utara ketinggian dataran itu mencapai 700 meter di atas permukaan laut.<sup>13</sup>

Berdasarkan *Staatblad* no. 235 (SK Gubernur Jendral 13 Juni 1901, No. 26), bahwa sejak 1 Agustus 1901 Keresidenan Kedu dalam penelitian ini, merupakan daerah yang dahulu adalah Kedu dan Bagelen. Secara administratif pada abad ke-19 Keresidenan Kedu hanya meliputi Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung. Sejak 1 Agustus 1901 Keresidenan Kedu baru dibentuk dengan penggabungan Bagelen. Keresidenan Bagelen sendiri sebelum digabung dengan Kedu terdiri dari lima kabupaten, namun sejak 1 Agustus 1901 kabupaten Kotoarjo dan Karanganyar dihapus dan digabung dengan kabupaten Purworejo dan Kebumen. Dengan demikian, keresidenan Kedu terdiri dari lima kabupaten yaitu pertama, Kabupaten Magelang yang memiliki enam distrik yaitu Salaman, Salam, Muntilan, Tegalrejo, Grabag dan Magelang. Kedua, Kabupaten Temanggoeng yang terdiri dari tiga distrik yaitu Temanggoeng, Parakan, dan Tjandiroto. Ketiga, Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari empat desa yaitu Wonosobo, Garoeng, Sapoerang, Kaliwiro. Keempat, Kabupaten Poerworedjo yang terdiri lima distrik yaitu Poerworedjo, Loano, Koetoardjo, Kemiri,

<sup>13</sup> *Boschbouwkundig tijdschrift tectona uitgava der vereeniging van ambtenaren bij het boschwezen in Nederlands Oost Indie Uitgava. Deel IV. (Weltevreden: Snelpersdrukkerij, 1912).*

Poerwodadi. Kelima, Kabupaten Keboemen yang terdiri dari enam distrik yaitu Keboemen, Koetawinangoen, Pemboen, Karanganyar, Gombong, Penjagoan. Luas wilayah Keresidenan Kedu pasca 1901 ini mencapai hampir 5500 Km<sup>2</sup>.<sup>14</sup>

Tidak banyak keresidenan di Jawa yang batas-batasnya sedemikian rupa ditentukan oleh alam seperti Kedu. Batas-batas alam ini kebanyakan adalah berupa aliran Sungai, kecuali di Bagian Barat Daya dan Timur Laut yang dibentuk oleh deretan gunung atau tanah datar. Adapun daerah-daerah yang berbatasan dengan Kedu adalah sebelah Barat daerah Semarang dan Banjumas, sebelah timur daerah Semarang, Surakarta dan Yogyakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Yogyakarta dan Lautan Hindia, sebelah barat dan barat daya oleh Keresidenan Banyumas.<sup>15</sup>

Ditinjau secara ekologis, wilayah Kedu biasanya di ibaratkan sebagai sebuah kawah besar dengan dasar miring yang di sebelah Barat, Utara dan Timurnya tersebar Gunung berapi. Pegunungan selatan (Menoreh) merupakan bentuk rangkaian, perantara deretan bukit di utara adalah vulkanis tersier.

Dengan kondisi alam seperti ini wilayah Kedu secara ekologis sesuai untuk pertanian persawahan maupun pertanian tanah kering bagi penduduknya. Curah hujan tergolong sangat tinggi, meskipun wilayah Temanggung dan Magelang masing-masing memiliki curah hujan selama dua bulan (kurang dari 60 mm).

Laju aliran sungai yang utama pada daerah ini adalah sungai Progo yang melintasi hampir sepanjang wilayah Kedu. Aliran sungai ini berasal dari Goa Jumprit di timur laut Sindoro dan mengalir di sebelah barat Kedu. Arus utama bagian timur adalah Sungai Elo yang berasal dari Rancah yang mengalir wilayah Kedu Timur dan bertemu dengan Sungai Progo.

Secara demografis, penduduk daerah Kedu baru diketahui secara pasti setelah masa pendudukan Inggris di Jawa ketika sistem pajak tanah hendak diterapkan. Dari hasil cacah jiwa yang dilakukan oleh Raffles diketahui bahwa jumlah penduduk Kedu pada tahun 1812 adalah 197.310 jiwa.

P. de Clerg, selaku residen Kedu, merasa yakin bahwa pertumbuhan yang pesat ini karena adanya beberapa kelebihan kolonisasi Belanda. Menurutnya sejak penggabungan Kedu ke dalam naungan pemerintah kolonial, selama 7 tahun telah terjadi pembukaan desa-desa baru di sepanjang batas perbatasan *Vorstelanden*. Hal ini jelas merupakan bukti bahwa banyaknya keluarga yang datang di wilayah ini adalah karena adanya jaminan bagi keamanan pribadi. Penarikan pajak yang lebih teratur dan tidak menekan, kebebasan atas hak milik tanahnya, pembebasan dari semua kerja wajib dan

---

<sup>14</sup> *Staatsblad* tahun 1901 No. 235; *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. Tweede Deel H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-M. (s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1918), hlm. 293.

<sup>15</sup> *Ibid.*

kepastian akan keadilan akan kepentingan penduduk menurut Clerg bisa dibuktikan disini.<sup>16</sup> Selain alasan-alasan yang diberikan di atas, faktor lain adalah pemberian vaksin cacar kepada penduduk jelas berpengalaman terhadap angka kematian. Di samping itu, terciptanya keamanan disertai dengan penanganan yang baik di antara penduduk telah memberikan dampak yang menguntungkan. Pembukaan kebun-kebun kopi menurut Clerg dan kebun-kebun lainnya jelas memberi jaminan kemakmuran terhadap penduduk.

Bram Peper tidak sependapat dengan Clerg dan menolak alasan-alasan diatas. Menurutny,<sup>17</sup> tidak ada peningkatan kemakmuran di Jawa termasuk di Kedu pada masa pendudukan Belanda pada abad ke-19. Memang tidak dapat disangkal jika vaksinasi cacar membawa pengaruh substansial terhadap angka kematian, tetapi program vaksinasi tetap terbatas terutama pada wilayah pemukiman orang-orang Eropa; dan rakyat yang masih buta huruf pada waktu itu tidak melihat perlunya vaksinasi. Pandangan yang menganggap *Pax Nerlandica* merupakan faktor penting yang dapat menjelaskan cepatnya pertumbuhan penduduk harus ditolak. Hal ini karena pada tahun 1825-1830 di Jawa terjadi perang Diponegoro yang banyak memakan korban.

Dari analisisnya ini selanjutnya Bram Peper mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk di Jawa dan di Kedu khususnya tidak tergolong luar biasa dan dianggapnya sesuai dengan pola kependudukan masyarakat agraris. Perkembangan dan perubahan jumlah penduduk tidak hanya bergantung kepada jumlah kelahiran dan kematian saja. Di Keresidenan Kedu terjadi migrasi yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Penduduk yang pergi dan datang ke Kedu diperoleh angka-angka bahwa jumlah total penduduk Kedu yang datang (47.827), ternyata lebih besar daripada yang meninggalkan Kedu yakni (333.951). Perbandingannya adalah 1:6. Dari angka-angka ini berarti di Kedu ada indikasi terjadi suatu gejala kekurangmakmuran di kalangan penduduk di tengah-tengah perkembangan ekonomi yang pesat pada masa Tanam Paksa dan masa Liberal.

### **Kebijakan Ekonomi kolonial dan Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk**

Bagaimana cara yang terbaik untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari daerah koloni, rupanya menjadi ajang perdebatan yang menarik sejak dibubarkannya VOC hingga tahun 1830. Dalam tulisannya yang berjudul *Berigt van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen in Oost Indien* (1799) dan tulisan-tulisan lainnya Van Hogendorp mengemukakan beberapa pandangan tentang bagaimana mengelola tanah jajahan yang baik. Pertama-tama ia menyoroti kebobrokan-kebobrokan dari *stelsel* VOC. Kedua ia mengemukakan

---

<sup>16</sup> Kedoe Statistiek 1822.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 78-82.

Dengan banyaknya perdebatan dan kritikan terhadap sistem Tanam Paksa, maka pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan baru bagi masyarakat yang berupa politik liberal. Pemerintah kolonial memberikan kebebasan kepada pengusaha-pengusaha partikelir untuk menanamkan modal mereka dalam mengusahakan pertanian ekspor dan mereka juga tidak akan ikut campur tangan dengan kehidupan ekonomi, tetapi membiarkannya kepada perkembangan kekuatan-kekuatan pasar. Untuk melaksanakan kebijakan itu pemerintah memberikan perlindungan dasar kepada penduduk Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan kedudukan mereka yang lemah. Perlindungan dasar itu adalah Undang-undang Agraria tahun 1870 yang menegaskan bahwa hak milik dari penduduk pribumi atas tanahnya dan melarang perpindahan hak milik itu kepada orang-orang asing. Oleh karena itu, pengusaha-pengusaha Barat dapat menyewa tanah penduduk untuk membuka perkebunan besar.<sup>23</sup>

Wilayah Kedu, sebelum kedatangan bangsa Barat termasuk kedalam wilayah Kerajaan Mataram Islam yang muncul sejak abad ke-17. Sebagai bagian dari wilayah Kerajaan Mataram daerah Kedu mempunyai peranan penting yaitu sebagai gudang beras. Mengenai sistim pemilikan tanah berdasarkan hasil penelitian yang dirangkum oleh D.W. Rost van Tonnigen adalah seperti berikut. Di bawah pemerintahan Sultan Mataram dan kemudian di bawah para raja Solo dan Yogya, para *tumenggung* dan para bangsawan lain digaji dengan tanah. Tanah ini tadinya merupakan tanah liar yang kemudian dibuka oleh para pengikut atau rakyatnya. Tanah-tanah ini kemudian dianggap sebagai *yoso* yang kemudian disewakan kepada *bekel*.<sup>24</sup>

Daerah ini dibagi menjadi tanah *bumi* dan tanah *bumijo*. Tanah bumi terletak dibagian Barat Sungai Progo dengan luas 7500 *cacah* berada dibawah wewenang *weda bumi*, sedangkan tanah Bumijo dengan luas yang sama terletak di sebelah timur Sungai Progo dibawah wewenang *wedono bumijo*. Pada masa ini Kedu tidak diperintahkan oleh penguasa daerah, melainkan oleh beberapa *demang*. Para *demang* ini mempunyai tugas khusus antara lain mengurus masalah-masalah keamanan diserahkan kepada beberapa orang *gunung*. Para *demang* ini bertanggung jawab pada *patuh*, yaitu pejabat yang menguasai *lungguh* didaerah Kedu dan menyewakannya kepada *demang* itu.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Burger, *op. cit.* hlm. 207-209.

<sup>24</sup>*Eindresume van het bij Gouvernement Besluit dd. 10 Juni 1867 No. 2 Bevolking onderzoek naar de rechten van den Inlander op den grond op Java en Madoera, tweede gedeelte.* (Batavia: Samengesteld door den chef der afdeeling statistiek ter algemeen secretarie. 1880).

<sup>25</sup>Djuliati Suroyo, *op. cit.*, (Yogyakarta: Dissertasi S-3 UGM), hlm. 69.

Pada awal abad ke-17, terjadi sengketa terhadap tanah-tanah *yoso* ini hingga sampai terjadi peperangan hebat antara Pengeran Mangkubumi dan kakaknya, yang berakhir dengan pembagian pekerjaan itu pada tahun 1755.<sup>26</sup>

Pada awal abad ke-19, sebelum Inggris menganeksasi daerah ini, masyarakat Kedu masih merupakan masyarakat petani yang sederhana. Kegiatan pertanian masih murni ditangani oleh penduduk setempat serta untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Semua modal, tenaga kerja dan saran-saran lain disediakan oleh mereka sendiri. Dalam menanam dan memanen serta memasarkan hasil-pertaniannya, mereka menggunakan peralatan yang masih sederhana dan dibantu oleh tenaga hewan.<sup>27</sup>

Pada tahun 1812, Kedu masuk dalam wilayah kekuasaan Inggris setelah terlebih dahulu terjadi peperangan antara Inggris dan Yogyakarta. Di bawah Inggris Kedu dijadikan sebuah keresidenan, sebagai residen sementara diangkat John Crawford, merangkap residen Yogyakarta. Langkah pertama yang diambilnya adalah terlebih dahulu mengadakan penelitian yang berkenaan dengan sosial-ekonomi serta mempelajari sistem perpajakan yang berlaku di Kedu pada saat itu sebelum menentukan pelaksanaan *landrent*.<sup>28</sup>

**Tabel 1. Jumlah pajak tanah di Kedu selama masa pemerintahan Inggris**

Tahun	Jumlah
1812	f.246.400,-
1813	f.197.120,-
1814	f.419.760,-
1816	f.378.404,-

Sumber: Juliati Suroyo, *op.cit.* hlm.120.

Dari hasil penelitian Crawford ini menunjukkan bahwa sistem pajak uang sebenarnya sudah berkembang di Kedu, tetapi cara pemungutannya tidak efisien karena dianggap terlalu banyak perantara antara petani pembayar pajak dan raja sebagai pemilik tanah. Kelancaran pelaksanaan sistem pajak tanah di Kedu pada masa Raffles ini, bukanlah semata-mata karena indikasi adanya kemakmuran di kalangan penduduk, melainkan tidak dari satu beban baru yang lebih memberatkan kondisi ekonomi petani. Hal ini dikarenakan pajak tanah, bukanlah satu-satunya pajak yang ditanggung oleh petani. Walaupun Raffles

<sup>26</sup> Eindresume, *loc.cit.*

<sup>27</sup> Kedoe Statistisch, 1822.

<sup>28</sup> Djuliaty Suroyo, *op. cit.*, hlm. 112





telah menghapus peran bupati dan *demang* sebagai penarik pajak, kenyataan petani juga masih dikenai beberapa jenis pajak lama, seperti *pacumpleng* yang secara resmi dikenakan kepada mereka yang memiliki rumah atau pekarangan, pajak bandar, pajak pasar serta pajak tidak langsung seperti candu dan garam yang menjadi monopoli pemerintah.<sup>29</sup>

Tahun 1816 adalah tahun terakhir pendudukan Inggris atas Hindia Belanda yang kemudian diserahkan kembali kepada Belanda. Kebijakan liberal Raffles, dilanjutkan oleh Komisaris Jenderal Hindia Belanda dengan beberapa perubahan yaitu pengaktifan kembali para aristokrasi dalam kegiatan produksi dan perdagangan.<sup>30</sup>

Di Keresidenan Kedu yang untuk sementara di rangkap oleh A.M.T. de Salis residen Pekalongan, menyuruh penduduk untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia dan menjual sebagaian hasilnya sebagai pajak. Tanaman yang dianjurkan khususnya adalah Kopi. Karena kesediaan pemerintah untuk membeli hasilnya sesuai dengan harga pasaran, maka makin banyak petani yang menanam kopi baik di tanah pekarangannya sendiri maupun di hutan sekitar rumah mereka. Usaha penanaman kopi ini adalah usaha sampingan rakyat Kedu yang sangat mendatangkan keuntungan.

Di samping itu penarikan pajak kopi seringkali merugikan petani. Secara teoritis berdasarkan undang-undang petani harus mengeluarkan pajak kopi sebesar 2/5 dari hasil panen setiap tahun dan sisanya boleh di jual bebas. Apa yang terjadi pada diri petani bukanlah sesuai dengan peraturan, pemerintah sering menghargai kopi di Kedu dengan harga rendah tetapi tetap mengenakan pajak yang tinggi. Misalnya pada tahun 1826 pemerintah pusat menetapkan harga kopi per pikul f 23,10,- membeli kopi rakyat sebesar f 13,- sampai f 15.<sup>31</sup> Keadaan ini diperburuk lagi dengan kenaikan harga beras yang sangat memberatkan rakyat. Dari tahun ke tahun menjelang perang Jawa harga padi tidak stabil dan cenderung menaik.

Keadaan ekonomi yang menurun mencapai batas subsistensi sebagai akibat tingginya pajak dan lain-lain dan ketidakpuasan di kalangan para bangsawan mendorong petani untuk mudah diajak berontak. Pemberontakan kecil pecah di Kedu pada tahun 1822 yang di pimpin oleh pangeran Diposono putra Hamengkubuwono I. Walaupun pemberontakan ini berhasil ditumpas dalam waktu dua hari, namun bibit-bibit perang masih belum mati di kalangan penduduk.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 124

<sup>30</sup> R.E. Elson, *op. cit.* hlm. 25

<sup>31</sup> Djulianti Suroyo, hlm. 131

**Tabel 2. Harga Padi per pikul**

Tahun	Harga
1820	f 4,15,-
1822	f 5,-
1823	f 3,80,-
1824	f 4,-
1825	f 4,40,-

Sumber: Djulianti Surojo, *ibid.*, hlm. 135.

Perang Jawa yang dikobarkan oleh Diponegoro meletus pada tahun 1825. Pemberontakan ini dengan cepat menjalar dan memperoleh dukungan hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lima belas dari duapuluh sembilan pengeran bergabung dengan Dipanegara; demikian juga empat puluh satu dari delapan puluh delapan bupati.

#### **Kondisi ekonomi penduduk Kedu selama periode Tanam Paksa**

Selama tiga dekade sejak kebangkrutan VOC telah menimbulkan banyak perdebatan mengenai kebijakan kolonial, tetapi sampai tahun 1829 sedikit sekali terjadi perubahan yang mendasar yang dapat mencapai tujuan mendatangkan keuntungan. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch, sebagai Gubernur Jenderal baru, membuat skema baru yang kelak dikenal sebagai sistem tanam paksa.

Van den Bosch mempergunakan desa Jawa untuk produksi ekspor sebagai titik pijak dan menjadikannya sebagai inti dari Tanam Paksa. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor yang dikehendaki pemerintah dan penanaman itu dipimpin oleh kepala desa para petani diwajibkan menanam itu dipimpin lagi oleh kepala desa di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Dalam sistem Tanam Paksa para petani diwajibkan menanam beberapa jenis tanaman komersial.

Di Kedu sebagaimana juga di keresidenan-keresidenan lain di Jawa, telah mengenal penanaman kopi sejak pelaksanaan sistem pajak tanah. Pada masa Tanam Paksa petani Kedu tidak luput pula dari upaya pengerahan tenaga wajib. Mengenai perincian kerja wajib untuk tanam kopi ini seorang kontrolir dari *afdeeling* Probolinggo membuat perincian sebagai berikut: apabila satu keluarga petani seperti yang dilaksanakan di Cirebon dibebani untuk memelihara sekitar 500 pohon, maka di Kedu berlaku hal yang serupa. Di Kedu 500 buah pohon ini terjadi dari 50 batang tanaman baru, 50 batang tanaman kopi berumur 1 tahun,

50 batang pohon berumur 2 tahun, 50 batang pohon berumur 3 tahun, serta lebihnya menanam pohon kopi yang sudah berbuah.

Produksi kopi di Kedu pada tahun 1834 adalah jumlah kopi 66.906, jumlah yang tumbuh 9.597.925, jumlah pohon yang berbuah 7.020.384. Selain kopi tanaman wajib lain yang dikenakan pemerintah di Kedu adalah indigo, tembakau dan teh. Hasil panen produksi tanaman jenis-jenis ini dapat dilihat dalam tabel 4. Hasil panen indigo dari Karesidenan Kedu menduduki rangking ke 2 setelah Madiun. Hasil panen tembakau menduduki rangking ke 3 setelah Rembang dan Semarang, sedangkan teh menduduki rangking ke 4. Adapun gula tidak dihasilkan di Karesidenan Kedu.

Pada tabel 3 dapat kita lihat bahwa untuk tanaman kopi Kedu menduduki rangking teratas setelah Priangan. Semua hasil panen yang menakjubkan ini, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari pengerahan tenaga kerja yang cenderung eksploitatif, sehingga banyak petani berusaha untuk "melarikan diri" dari sistem kerja ini.<sup>32</sup>

Pada periode Tanam Paksa dapat dikatakan bahwa masyarakat desa Kedu adalah sebagai suatu masyarakat petani yang aktif dan cukup sibuk. Kesibukan petani pada masa ini tidak hanya berupa beban kerja membuka areal perkebunan baru milik pemerintah dan menanaminya dengan tanaman wajib, tetapi juga mereka harus menanam sebagian dari pekarangannya untuk jenis-jenis tanaman yang telah ditentukan. Dalamnya pengaruh sistem ini terhadap penduduk desa Kedu mengakibatkan pola pertanian tanaman pangan penduduk pribumi menjadi stagnasi atau mandeg bahkan cenderung merosot. Sementara itu, ledakan jumlah penduduk Kedu menunjukkan grafik yang naik, meskipun pada tahun 1845 terjadi penurunan jumlah penduduk. Adapun sebab-sebab terjadinya penurunan ini tidak diketahui dengan jelas.

---

<sup>32</sup> Kasus penanaman wajib indigo di Kedu menunjukkan bahwa untuk menghindari kerja wajib jenis ini para petani melakukan berbagai usaha agar tidak terkena, dengan jalan "menyembunyikan" sawah dan menyatakan diri bukan pemilik sawah *sanggan*. Dengan cara ini berarti petani tersebut dianggap sebagai *wong mondhok* dan terbebas dari kerja wajib tanam. Sementara itu, untuk kasus pada tanaman kopi, cara yang dilakukan petani untuk terlepas dari kerja wajib tanam adalah melarikan diri dari desa. Contoh seperti ini banyak ditemukan di Distrik Probolinggo, Djulianti Suroyo, *op. cit.* hlm. 269-270.

**Tabel 3. Hasil Tanaman Wajib di Kedu dan Keresidenan-keresidenan lain di Jawa tahun 1837 (1) dan 1844 (2)**

Keresidenan	Indigo (bau)	Gula (bau)	Kopi (juta pohon)	Tembakau (bau)	Teh (bau)
Bagelen	(1) 5,136 (2) 12,110	- -	19,4 18,3	- -	168 552
Banten	(1) 75 (2) 2,647	- 1,806	17,7 10,5	- 83	- 250
Banyumas	(1) 6,543 (2) 6,586	- 400	22,5 23,2	186 -	15 326
Besuki	(1) 237 (2) 2,081	3,151 4,879	15,0 17,3	- -	35 -
Cirebon	(1) 8,737 (2) 9,234	1,899 2,897	24,4 23,9	- 43	56 497
Jepara	(1) 212 (2) -	2,349 4,968	7,2 5,4	- -	37 -
Kediri	(1) 1,240 (2) 1,270	700 808	12,4 15,0	- -	- -
Kedu	(1) - (2) 250	- -	26,0 30,4	200 -	- 225
Madiun	(1) 680 (2) 1,050	2,108 2,150	12,5 15,6	- -	- 88
Pasuruan	(1) - (2) -	6,684 7,160	8,1 19,5	- 197	- -
Pekalongan	(1) 4,389 (2) 4,235	658 1,600	9,5 10,2	- -	49 155
Priangan	(1) 240 (2) 2,695	- -	104,0 81,9	- -	220 852
Rembang	(1) - (2) -	- 650	2,1 1,3	259 1,978	- -
Semarang	(1) - (2) -	973 2,100	15,3 21,3	- 250	36 180
Surabaya	(1) - (2) -	4,652 6,841	2,4 2,4	- 70	48 36
Tegal	(1) 1,374 (2) -	1,040 3,050	12,0 10,9	- 90	87 232
<b>Total</b>	<b>(1) 28,863 (2) 42,153</b>	<b>24,214 39,309</b>	<b>316,2 313,8</b>	<b>645 2,711</b>	<b>926 3,614</b>

Sumber: R.E Elson, *Ibid.*, hlm. 86.

**Tabel 4. Luas Sawah, Produksi Padi dan Jumlah Penduduk Kedu 1836 - 1845**

Tahun	Luas Sawah (bahu)	Luas Tanam (bahu)	Produksi Padi (pikul)	Penduduk (orang)	Prod. Perkapita (pikul)
1836	43.622	43.622	1.337.616	299.817	4,5
1837	44.313	40.219	1.502.676	302.590	5
1838	44.460	43.117	1.502.676	302.785	5
1839	43.891	36.815	1.502.676	303.839	4,9
1840	44.902	38.110	1.843.888	305.819	6
1841	43.966	40.867	1.603.369	306.604	5,2
1842	42.154	39.249	1.646.607	306.581	5,4
1843	41.922	38.889	1.818.591	336.206	5,4
1844	42.180	37.535	1.161.072	399.490	2,9
1845	42.089	37.010	1.043.423	376.512	2,8

Sumber: Djulianti Suroyo, *ibid.*, hlm. 333.

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa suksesnya ekspansi ekonomi kolonial pada masa Tanam Paksa pada sektor perkebunan di Kedu ternyata tidak diimbangi oleh semakin baiknya produksi tanaman pangan. Di sisi lain ledakan penduduk menunjukkan grafik yang menaik dan produksi padi perkapita terjadi stagnasi, bahkan cenderung merosot. Dengan demikian, apabila kita menggunakan perbandingan antara perkembangan jumlah penduduk dan jumlah produksi padi perkapita dari tahun 1836-1845, dapat dikatakan bahwa di kalangan penduduk di pedesaan Kedu ada indikasi kurang makmur.

#### **Kondisi Ekonomi Penduduk di Pedesaan Kedu Selama Periode Liberal**

Pada tahun 1860 sistem Tanam Paksa mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan banyak terjadi tindak penyelewengan baik yang dilakukan oleh penguasa Belanda maupun oleh penguasa pribumi lokal, yang mencakup korupsi (*knoeierijen*), pemerasan (*knevelarijen*), dan penyalahgunaan wewenang (*misbruiken*). Kemunduran Sistem Tanam Paksa itu juga akibat adanya tekanan dari pengusaha-pengusaha swasta dan perhatian dunia terhadap perniagaan yang telah mendapat kekuasaan politik di negara Belanda. Keadaan ini menjadi lebih memuncak ketika adanya keinginan penguasa-penguasa Eropa di Jawa agar mengakhiri pengawasan tanah oleh pemerintah dengan tujuan mereka dapat mencari keuntungan mereka sendiri.<sup>33</sup>

<sup>33</sup>B.J.O. Schrieke, *Pengusa-pengusa Pribumi* (Jakarta: Pustaka Bhadrata, 1974), hlm 39-40.

Pada tahun 1870 pemerintah mengizinkan perusahaan-perusahaan swasta memasuki Pulau Jawa untuk menghindari keadaan ekonomi yang kacau. Dengan demikian, pemerintah yang menganut politik liberal itu memberi peluang terhadap usaha-usaha swasta dengan memberikan fasilitas administrasi, sarana-sarana hukum dan menjamin keamanan. Pada prinsipnya kebijakan ekonomi liberal pemerintah kolonial Belanda melindungi petani-petani terhadap pengaruh ekonomi uang yang berkuasa. Akan tetapi, kesejahteraan rakyat di Pulau Jawa justru menurun yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk memperbaiki ketidakadilan sosial, ekonomi, dan semakin bertambah kepetingan akan barang-barang konsumtif yang dihasilkan.<sup>34</sup>

Pada tahun 1900 muncul politik Etis sebagai tanggapan ketidakpuasan penduduk terhadap politik kolonial yang sedang berlangsung. Politik itu meliputi masalah-masalah edukasi, emigrasi, irigrasi, dan perubahan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam mengusahakan pembangunan tanah jajahan dengan modal swasta juga diperhitungkan akan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1902, Idenburg seorang opsir militer menghendaki adanya tindakan secepatnya dalam menghadapi kegagalan panen, kelaparan, dan kemiskinan. Adapun van Deventer melalui tulisan-tulisan dan pidato-pidatonya menjadi kekuatan penggerak untuk melaksanakan politik kebijakan yang baru.<sup>35</sup>

Di pedesaan Karesidenan Kedu dengan munculnya kebijakan ekonomi liberal, memasuki era baru bagi perekonomiannya. Kebijakan itu membuka pedesaan Karesidenan Kedu bagi penanaman modal swasta Belanda dan diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran bagi penduduk. Munculnya perkebunan besar pada masa ini, di satu sisi produksi tanaman ekspor meningkat, tetapi belum dapat mengangkat kesejahteraan penduduk pribumi, sebaliknya keuntungan-keuntungan dari ekonomi liberal ini justru banyak diraup oleh etnis Cina.

Pada tahun 1905, di Bagelen terdapat satu perkebunan teh dan kina yang diolah secara besar-besaran dengan menyewa tanah sebesar 1325 *bahu* yang terdiri dari tiga persil dan terletak di *Afdeeling* Wonosobo. Adapun perkebunan nila di Bagelen Selatan yang dieksploitasi oleh *Nederlands Handel Maatschappij* ditutup karena tanaman itu tidak menguntungkan lagi terutama karena letak Bagelen yang terisolir itu sangat membebani biaya pengolahannya. Di samping itu, terdapat beberapa perkebunan yang bekerja atas kontrak dengan penduduk yaitu dua *Afdeeling* Temanggung untuk minyak tanah dan enam *Afdeeling* Magelang yang mana satu untuk minyak tanah dan lima untuk menanam tebu. Di *Afdeeling* Wonosobo juga ditanami tebu yang pemiliknya tinggal di Banyumas. Di

---

<sup>34</sup> Robert Van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 19.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 59-63.

Prembun, *Afdeeling* Kebumen dan di Purworejo *Afdeeling* Purworejo juga terdapat pabrik gula yang dikelola secara besar-besaran. Meskipun pabrik gula di Purworejo belum memenuhi kapasitas yang mutlak, tetapi juga bisa menjadi salah satu pabrik terbesar di Jawa dengan penanaman sekitar 4000 *bahu*. Adapun di dataran tinggi Temanggung, Wonosobo, dan Magelang tanah seluas 41.000 *bahu* baik sawah maupun tegalan oleh penduduk ditanami tembakau, tetapi yang mendapat keuntungan sebagian besar yang diperoleh dari tanaman itu adalah pedagang Cina yang memberi uang muka untuk usaha tanaman itu.<sup>36</sup>

Pada tahun 1905, penduduk Kedu berjumlah 2,5 juta jiwa yang termasuk 2.300 orang Eropa, 13.200 orang Cina, 200 orang Arab dan Timur asing. Sebagian besar, penduduk memproduksi padi di tanah-tanah sawah. Tanah sawah mendapat air secara teratur dari irigasi dan curah hujan. Tanah sawah di Kedu dibagi menjadi tiga yaitu pertama, tanah sawah teknis atau tanah sawah yang dikelola dengan irigasi sepanjang tahun. Kedua, tanah sawah setengah teknis yaitu tanah sawah yang dikelola dengan pengairan hanya pada waktu musim hujan. Ketiga, tanah sawah tadah hujan. Adapun lahan pertanian penduduk pribumi mencakup luas sawah dengan irigasi seluas 167.097 *bahu*, dan sawah setengah teknis setengah rawa seluas 3.600 *bahu*, serta sawah tadah hujan seluas 61.311 *bau*. Di samping penanaman padi di sawah petani di Kedu juga mengusahakan tanaman padi di tegalan yang ditanami jenis padi kering atau padi gaga. Luas tanah tegalan itu 173.746 *bahu* dan tanah yang tidak ditanami secara teratur mencapai 89.799 *bahu*. Dengan demikian jumlah lahan pertanian seluruhnya adalah 449.573 *bahu*.<sup>37</sup> Di Kabupaten Purworejo pada tahun 1903 berpenduduk 540.000 jiwa yang memiliki hasil padi yang merosot, sehingga harus mengimpor beras untuk mencukupi kebutuhan produksi beras lokal. Lahan pertanian seluas 67.857 *bahu* menghasilkan padi sebesar 1.764.334 pikul. Oleh karena itu, setiap orang rata-rata memperoleh 3,27 *pikul* padi.<sup>38</sup>

Apabila dilihat pendapatan petani per rumah tangga dan rata-rata per kapita menunjukkan sangat rendah. Pada tahun 1904, harga padi f.1.9,- per *pikul* dan pendapatan padi Purworejo sebesar 1.764.334 *pikul* dan pendapatan padi per tahun adalah f.3.353.235. Adapun jumlah petani adalah 60.264, maka pendapatan rata-rata dari padi kurang lebih f.55,62 per tahun. Angka ini masih berada pada batas angka hidup minimum f.60,- yang di kemukakan Brooshooft. Menurutnya, pendapatan f. 60,- per tahun bagi kehidupan petani hanya sekedar cukup untuk makan, dengan kata lain hidup mereka berada pada batas

<sup>36</sup> De.S. Graaf dan D.G. Stibe (eds.), *Encyclopaedie van Nederlandsche-Indie* ('S-Gravenhage: Martinus Nijnhooft/Leiden: E.J. Brill), hlm. 293.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> C.L. van Doorn, *Schets van de economische ontwikkeling der Afdeeling Poerworejo (Resident Kedoe)* (Weltevreden: G. Kolff & Co, 1926), hlm. 66-185

subsistensi. Demikian pula yang di alami petani di desa Kaligesing yang memiliki pendapatan padi sebesar 16 *pikul* yang termasuk sangat rendah, maka total pendapatan kotor adalah f. 30.4,-.

Kasus kekurangmakmuran lain pada masa Liberal yang lain adalah anggaran belanja petani miskin di sebuah desa di *Afdeeling* Kutoarjo. Para penduduk memiliki lahan pertanian yang tidak subur. Pada musim kemarau sebagian besar tanahnya terlalu keras untuk ditanami dengan tanaman dan dimusim hujan hasilnya sangat sedikit sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5. Anggaran belanja rumah tangga petani kurang makmur di Afdeeling Kutoarjo**

Pengeluaran		Penghasilan		Saldo
* Makan	f. 24	Panen	f. 28	
* Pajak	f.17,5	Upah Panen	f. 11	
* Kebutuhan lain	f. 9	Hasil Pekarangan	f. 7	
* Pakaian	f. 3	Penghasil tambahan	f. 21,2	
* Penggarapan sawah	f.17,5			
* Perbaikan rumah	f.1			
* Slametan	f.1,5			
Total	f.73,5	Total	f.67,2	f. 6,3

Sumber: *Indische Gids*, Jilid I, hlm. 263

keterangan: Harga padi 1 ongg = f. 2

Pada tabel diatas, dilihat dari penghasilan dan pengeluaran, terdapat kekurangan biaya yang harus ditanggung adalah f. 6,3. Untuk menutup kekurangan ini, selanjutnya tujuh bulan kemudian dua kali sehari, untuk kekurangannya mereka memakan sayur-sayuran. Heyting, seorang kontrolir di *Afdeeling* Kutoarjo, mengungkapkan beban hidup petani pribumi di lereng pegunungan pada tabel di bawah :

**Tabel 6. Belanja Rumah Tangga Petani di Lereng Gunung Kutoarjo**

Pengeluaran	Pemasukan	Saldo
Padi 7,5 ongg	Padi 11 ongg	Padi 3,5 ongg
Uang f.36	Uang f.32,15	Uang - f.4

Sumber: *Indische Gids*, 1886, hlm. 262



Kekurangmakmuran penduduk pedesaan Kedu pada masa Liberal antara lain juga disebabkan oleh kerja wajib. Syarat yang dibebankan pada petani tergantung dari kebijaksanaan *bekel* atau aparat desa yang menjadi atasannya. Sebuah kasus di Desa Bendo Distrik Kemiri, Cowikromo memiliki beban kerja wajib yang sangat berat, sehingga tidak memiliki waktu untuk memikirkan lahan tanahnya sendiri. Jumlah jam untuk kerja desa pada hari yang sama sangat besar. Para penduduk desa mulai ronda pukul 19:00 petang dan meninggalkan rumah pada pukul 05:00. Adapun kerja pancen dimulai pukul 06:00 - 07:00 dan berakhir hingga 04:00-05:00. Di antara penggarapan tanah, terdapat pengolahan sawah dan tegalan maupun tanah pekarangan seperti pencangkulan, penanaman, pemotongan rumput, perawatan pagar. Kerja sampingannya adalah membuat *dawet* atau minuman segar yang disenangi penduduk desa. Para istri menenun pakaian.

Di Desa Kemiri tidak ditanami kopi, sehingga tidak ada kerja wajib perkebunan. Adapun kerja desa dan kerja bebas berturut-turut 394 jam, 821 jam, dan 1044 jam, sehingga jumlah semuanya 2259 jam sepanjang tahun setelah dikurangi 40 hari untuk istirahat. Dengan demikian, setiap hari rata-rata menghabiskan 1,2; 2,5; 3,2 jam. Sehingga untuk kerja desa dan kerja bebas memerlukan waktu 7 jam. Apabila kerja harian dihitung 12 jam menurut *Staatsblad* 1885 No. 211 pasal II, maka untuk kerja wajib ditetapkan 33 jam dan kerja desa 68 jam. Dengan demikian, penduduk desa melakukan kerja wajib sebanyak 77 kali dan untuk kerja desa 110 kali, sehingga rata-rata kerja wajib memerlukan 5 jam dan rata-rata kerja desas memerlukan 7 jam.

Dengan adanya beban kerja yang harus diterima oleh keluarga Cowikromo mengakibatkan merosotnya keuangan mereka, seperti dalam tabel di bawah.

**Tabel 7. Belanja Rumah Tangga Keluarga Cowikromo**

Pengeluaran		Penghasilan		Saldo
Pajak	914 duit	Usaha	3.408 duit	
Makanan	1.032 duit	Upah	73 duit	
Ayam	6.132 duit	Ternak	1.258 duit	
Dukun	150 duit	Dipinjamkan	1.258 duit	
Untuk Usaha	2.549 duit	Diterima	14 duit	
Pakaian	320 duit	Padi	228 duit	
Slametan	416 duit	<b>Total</b>	<b>6.255 duit</b>	
Hutang	541 duit			
Bibit	235 duit			-6.036 duit
<b>Total</b>	<b>12.291 duit</b>			<b>-6.036 duit</b>

Sumber: *Indhische Gids*, 1886, hlm. 262.

Pengeluaran berupa uang total keluarga Cowikromo adalah 12.291 *duit* dan jumlah penghasilan semuanya sebesar 6.255 *duit*. Dengan demikian, keluarga Cowikromo masih harus membayar hutangnya sebesar 6.036 *duit*.

### Penutup

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa adanya beban yang diwajibkan untuk dilakukan bagi petani dan apabila kewajiban itu tidak dilakukan, maka diberlakukan sangsi yang mempersulit bagi keberadaan petani di pedesaan Keresidenan Kedu. Sejak zaman Raffles petani diwajibkan membayar pajak tanah, sehingga kebutuhan akan uang tunai semakin meningkat di kalangan penduduk. Kondisi ini mengakibatkan para petani di pedesaan keresidenan Kedu tidak lepas dari pemerasan-pemerasan dari berbagai pihak, seperti mereka harus meminjam uang kepada petani kaya, bekel, atau Cina dengan jalan menggadaikan hasil panen, sehingga setelah panen memaksa mereka dengan harga di bawah standar untuk membayar pajak.

Beban petani diperberat dengan adanya korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah, yaitu petani diharuskan membayar pajak tanah terlebih dahulu sebelum awal tahun fiskal. Demikian pula, pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang bersifat eksploitatif yang mewajibkan rakyat menanam kopi di tanah-tanah perkebunan baru dan memberi para pejabat lokal *cultuur procenten* apabila melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, berarti pemerintah menuntut tenaga kerja rakyat dan membatasi kebebasan petani untuk berproduksi. Di samping itu, penarikan pajak kopi sangat merugikan petani karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Petani diwajibkan membayar pajak yang tinggi, lebih dari 2/5 dari hasil panen setiap tahun.

Keadaan petani seperti itu diperburuk dengan kenaikan harga beras yang sangat memberatkan rakyat. Keadaan ekonomi yang semakin mencapai batas subsistensi akibat tingginya pajak dan ketidakpuasan di kalangan para bangsawan mendorong petani mudah untuk diajak berontok. Pemberontakan P. Diponegoro yang meletus tahun 1825-1830 mengakibatkan hampir  $\frac{3}{4}$  wilayah pedesaan Kedu hancur. Untuk memperbaiki wilayah yang hancur dan meredakan pemberontakan itu, pemerintah kolonial mengerahkan petani setempat yang tidak ikut pemberontakan. Para petani dikerahkan secara paksa untuk memperbaiki jalan-jalan dan jembatan-jembatan yang rusak, membangun benteng *stelsel* untuk mengakhiri perlawanan Diponegoro dan secara permanen untuk mengawasi penduduk setempat.

Pada masa Tanan Paksa, para petani di Keresidenan Kedu dipaksa menanam tanaman yang dikehendaki pemerintah dan penanaman itu dipimpin oleh kepala desa di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Kondisi ini menyebabkan petani tidak dapat mengolah tanaman pangan, sehingga wajar apabila tanaman

pangan di pedesaan Keresidenan Kedu mengalami Kedu mengalami stagnasi dan kemerosotan, sementara di pihak lain jumlah penduduk semakin naik.

Di pedesaan Kedu dengan modelnya kebijakan ekonomi liberal ternyata belum mampu mengangkat penduduk pribumi dari kurang-makmur. Pendapatan petani per rumah tangga dan rata-rata perkapita masih menunjukkan angka yang sangat rendah, yakni f 55.62 per tahun. Pendapatan sebesar itu masih berada pada batas angka hidup minimum f 60 yang dikemukakan oleh Broshooft. Menurut Broshooft pendapatan f 60 per tahun bagi kehidupan petani hanya cukup sekedar untuk makan. Bahkan mereka berada pada batas subsistensi. Di samping itu para petani masih diwajibkan untuk memberikan jasanya dalam bentuk wajib kerja. Syarat yang dibebankan kepada petani tergantung dari kebijakan bekel atau aparat desa yang menjadi atasannya.

### Daftar Pustaka

#### Arsip Nasional Republik Indonesia :

Koleksi Algemeen Secretarie dan Pasar Ikan

*Besluit*, 2 Maret 1891, No. 10

*Besluit*, 13 April 1892, No. 7

*Besluit*, 22 Oktober 1893, No. 7

*Kedoe Statistics*. 1822 :

*Statistics of the Kedoe Residency*, 1838

*Statistical Statements of the Kedoe Residency*, 1834-1836

Kedoe 1822-1902

#### Buku dan Artikel

Anne Booth (ed.). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1988.

Beckford, George L. *Persistent Poverty: Underdevelopment in Plantation Economies of The Third World*. New York: Oxford University Press, 1972.

Boomgard, Peter (ed.) "Wages 1820-1940", dalam : *Changing Economy in Indonesia, A Selection of Statistical Source Material from The Early 19<sup>th</sup> Century up to 1940. Volume 13*. Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1992.

——. "Food Crops and Arable Lands, Java 1815-1942", dalam : *Changing Economy in Indonesia, A Selection of Statistical Source Material from the Early 19<sup>th</sup> Century up to 1940. Volume 10*. Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1992.

——. "Population Trends 1795-1942", dalam : *Changing Economy in Indonesia, A Selection of Statistical Source Material from the Early 19<sup>th</sup> Century up to 1940. Volume 11*. Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1992.

——. "The Welfare Services in Indonesia, 1900-1942" dalam : *Itinerario Volume X (1986) No. 1*

——. *Between Sovereign Domain and Servile Tenure: The Development of Rights to Land in Java, 1780-1870*. Amsterdam: Free University Press, 1989.

Breman, J. *Penguasaan dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES, 1986.

Brooks, Russel Markham. *The Problems of Malnutrition within The Agricultural Economy of Bojonegoro, East Java*. Cornell University, 1890.

- Brooshooff, P. *Memorie Over de Toestand in Indie Economy, Ter Begeleiding van den Open Brief, op 7 Maart 1888 door 1255 Ingezetenen van Nederlandsch Heeren*. (Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun).
- Burger, D.H. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. Jilid I*. Djakarta: Pradnjaparamita, 1962.
- Boeke, J.H. *Prakapitalisme di Asia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Croes, C.E. *Memorie van Overgave Resident Bojonegoro*, 1930.
- Day, Clive. *The Policy and Administration of Dutch in Java*. New York: Macmillan, 1904.
- Deventer, C. T. van. *Overzicht van de Economischen Toestand der Indlandsche Bevolking van Java en Madoera*. S-Gravenhage: M. Nijhoff, 1904.
- Djoko Suryo. *Sejarah Pedesaan Keresidenan Semarang, 1830-1900*. Yogyakarta: PAU-UGM, 1989.
- Elson, R.E. "Kemiskinan dan Kemakmuran Kaum Petani pada Masa Tanam Paksa di Pulau Jawa", dalam: Anne Booth (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Fasseur, Cornelis. *The Politics of Colonial Exploitation: Java The Dutch, And The Cultivation System*. Translated from The Dutch by R.E. Elson and Ary Kraal. New York: Cornell University, 1992.
- Fernando, Radin. *Peasant and Plantation Economy: The Social Impact of European Plantation Economy in Cirebon Residency from The Cultivation System to The End of The First Decade of The Twentieth Century*. Melbourne: Monash University, 1982.
- "Femine in Cirebon Residency in Java 1844-1850: A New Perspective on The Cultivation System". *Monash Paper No. 21*. Centre of Southeast Asian Studies. Departement of History Monash University, 1980.
- Furnivall. *Netherlands Indie: A Study of Plural Economy*. Amsterdam: B.M. Israel B.V., 1976.
- Geertz, Clifford. *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press, 1963.
- Gonggrijp, G. *Schets Eener Economische Geschiedenis van Nederlands Indie*. Haarlem: F. Bohn, 1928.
- Hasselmann, C.J. *Algemeen overzicht van de uitkomsten van het Welvaart-Onderzoek, gehouden op Java en Madoera in 1904-1905*. S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1914.
- Kolonial Verslag. 1886-1910*.
- Korten, David C. dan Felipe B. Alfonso. *Bureucracy and The Poor: Closing The Gap*. New York: McGraw Hill International Book Company, 1981.
- Niel, Robert van. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- *Java Under The Cultivation System*. Leiden: KITLV Press, 1992.
- Penders, C.L.M. *Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in Northeast Java, Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Raffles, Th. S. *The History of Java*. London: Block Parbury, 1817.
- Sartono Kartodirdjo. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- *Protest Movement in Rural Java*. Singapura: Oxford U.P. 1973.
- *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Schrieke, B.J.O. *Penguasa-penguasa Pribumi*. Jakarta: Pustaka Bhatara, 1974.
- Scott, James, C. *The Moral Economy of The Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale UP, 1978.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie over Het Jaar 1926. No. 11/1926*.
- Vries, Eigbert de. *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*. Jakarta: PT Gramedia, 1985.
- Waxman, Chaim I. *The Stigma of Poverty: A Critique of Poverty theories and Policies*. New York: Pergamon Press, 1977.
- Wertheim, W.F. *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. Bandung: Sumur Bandung, 1960.